

Tax Compliance in Developing Countries – A Bibliometric Review of Empirical Studies

Heny Fitriani

¹Politeknik PGRI Banten, heny.fitriani88@gmail.com

Info Artikel	ABSTRAK
Article history: Received Jan, 2026 Revised Jan, 2026 Accepted Jan, 2026	Kepatuhan pajak merupakan elemen fundamental dalam keberlanjutan keuangan publik dan tata kelola di negara berkembang, namun hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan struktural, institusional, dan perilaku. Meskipun jumlah studi empiris mengenai kepatuhan pajak di negara berkembang terus meningkat, literatur yang ada cenderung terfragmentasi secara tematik, geografis, dan metodologis. Studi ini bertujuan untuk memetakan dan mensintesis perkembangan penelitian empiris tentang tax compliance di negara berkembang melalui pendekatan bibliometrik. Data diperoleh dari publikasi jurnal bereputasi yang terindeks Scopus dan dianalisis menggunakan teknik bibliometrik deskriptif dan relasional, meliputi analisis jaringan kata kunci, overlay temporal, densitas tema, kolaborasi penulis, institusi, dan negara dengan bantuan perangkat lunak VOSviewer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax compliance merupakan tema inti yang terhubung erat dengan taxation, tax enforcement, dan tax administration, mencerminkan dominasi pendekatan struktural dan kebijakan. Namun demikian, tren terkini menunjukkan pergeseran menuju pendekatan perilaku dan normatif melalui tema tax morale, trust, fairness, dan voluntary tax compliance, khususnya pada sektor UMKM. Analisis kolaborasi juga mengungkap dominasi institusi dan negara maju dalam produksi pengetahuan, dengan negara berkembang berperan sebagai konteks empiris utama. Studi ini memberikan kontribusi dengan menyajikan gambaran komprehensif lanskap riset kepatuhan pajak di negara berkembang serta mengidentifikasi peluang penelitian masa depan yang berorientasi pada digitalisasi perpajakan, tata kelola, dan pembangunan berkelanjutan.
Kata Kunci: Tax compliance; Negara berkembang; Studi bibliometric	
Keywords: Tax compliance; Developing countries; Bibliometric studies	
	ABSTRACT Tax compliance is a fundamental element in the sustainability of public finances and governance in developing countries, but it still faces various structural, institutional, and behavioral challenges. Although the number of empirical studies on tax compliance in developing countries continues to increase, the existing literature tends to be fragmented thematically, geographically, and methodologically. This study aims to map and synthesize the development of empirical research on tax compliance in developing countries through a bibliometric approach. Data were obtained from reputable journal publications indexed by Scopus and analyzed using descriptive and relational bibliometric techniques, including keyword network analysis, temporal overlay, theme density, author collaboration, institutions, and countries with the help of VOSviewer software. The

results show that tax compliance is a core theme closely linked to taxation, tax enforcement, and tax administration, reflecting the dominance of structural and policy approaches. However, recent trends show a shift towards behavioral and normative approaches through the themes of tax morale, trust, fairness, and voluntary tax compliance, particularly in the MSME sector. Collaboration analysis also reveals the dominance of developed institutions and countries in knowledge production, with developing countries serving as the primary empirical context. This study contributes by presenting a comprehensive overview of the tax compliance research landscape in developing countries and identifying future research opportunities oriented towards tax digitalization, governance, and sustainable development.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Heny Fitriani
Institution: Politeknik PGRI Banten
Email: heny.fitriani88@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak tetap menjadi landasan keuangan publik dan tata kelola di negara maju maupun negara berkembang. Namun, di negara berkembang, kepatuhan pajak secara terus-menerus menimbulkan tantangan signifikan karena faktor struktural, ekonomi, dan politik yang melemahkan efektivitas sistem pajak [1]. Tidak seperti negara maju di mana lembaga pajak telah memiliki waktu dan sumber daya yang cukup untuk berkembang, banyak negara berkembang masih dalam tahap awal pembentukan rezim pajak yang sistematis [2]. Kesenjangan ini mengakibatkan inefisiensi yang menghambat mobilisasi pendapatan, membatasi kapasitas investasi publik, dan pada akhirnya membatasi pembangunan sosial ekonomi [3], [4]. Secara historis, penelitian akademis tentang kepatuhan pajak berfokus pada penentu perilaku, ekonomi, dan kelembagaan, tetapi cakupan literatur yang berkaitan secara khusus dengan negara berkembang tidak merata dan tersebar di berbagai disiplin ilmu.

Dalam beberapa dekade terakhir, bidang studi perpajakan telah mengalami pertumbuhan yang substansial, dengan para sarjana semakin menerapkan lensa interdisipliner untuk memahami perilaku kepatuhan. Ekonom sering memanfaatkan model pilihan rasional dan pencegahan untuk menjelaskan keputusan wajib pajak, sementara sosiolog dan ilmuwan politik menekankan peran norma sosial, kepercayaan pada pemerintah, dan legitimasi kelembagaan [5], [6]. Di negara-negara berkembang, perspektif ini bertemu dengan cara yang kompleks karena pengalaman hidup warga negara dengan tata kelola, korupsi, dan penyediaan layanan publik memengaruhi kesediaan mereka untuk mematuhi kewajiban fiskal [7]. Misalnya, wajib pajak di beberapa negara mungkin menolak membayar pajak karena persepsi perlakuan tidak adil atau keyakinan bahwa dana publik disalahgunakan, yang pada gilirannya memicu penghindaran dan penggelapan pajak [8], [9]. Memahami pendorong yang beragam ini sangat penting untuk mengembangkan strategi kepatuhan yang efektif.

Sejumlah besar studi empiris telah muncul selama dua puluh tahun terakhir, yang meneliti kepatuhan pajak di berbagai konteks negara berkembang termasuk Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Amerika Latin. Studi-studi ini menggunakan berbagai metode — mulai dari survei kuesioner

terhadap pemilik usaha kecil hingga analisis data pajak administratif—dan menyelidiki berbagai sektor seperti pertanian, pasar tenaga kerja informal, dan perusahaan multinasional [8], [10]. Terlepas dari semakin banyaknya pengetahuan yang ada, para sarjana mencatat bahwa bukti empiris terfragmentasi berdasarkan wilayah, metodologi, dan pendekatan teoretis [4], [7]. Fragmentasi ini menyulitkan para pembuat kebijakan dan peneliti untuk mengidentifikasi pola yang konsisten dan intervensi efektif yang dapat meningkatkan kepatuhan di berbagai lingkungan.

Analisis bibliometrik menawarkan alat yang ampuh untuk mensintesis hasil karya ilmiah dan mengungkap struktur intelektual suatu bidang penelitian. Dengan memetakan secara kuantitatif tren publikasi, jaringan kepenulisan bersama, pola sitasi, dan kluster tematik, metode bibliometrik dapat menjelaskan bagaimana studi kepatuhan pajak di negara berkembang telah berkembang, di mana pusat pengetahuan yang berpengaruh berada, dan topik apa yang paling banyak mendapat perhatian atau masih kurang dieksplorasi [10]. Tinjauan semacam itu dapat memberikan perspektif meta kepada para pemangku kepentingan yang menginformasikan agenda penelitian, memperkuat koherensi teoretis, dan memandu perumusan kebijakan berbasis bukti. Di bidang keuangan publik di mana urgensi praktis beririsan dengan penyelidikan akademis, pemahaman yang kuat tentang bentuk dan lintasan literatur menjadi sangat berharga.

Namun, tinjauan bibliometrik tentang kepatuhan pajak sebagian besar berpusat pada kajian global atau negara maju, mengabaikan konteks berbeda dari negara berkembang. Seiring dengan terus meningkatnya hasil penelitian dari negara-negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, mensintesis kumpulan karya ini menjadi sangat penting untuk membangun pengetahuan kumulatif dan menyoroti kekhususan regional. Sama pentingnya adalah mengenali bidang penelitian baru yang muncul, seperti dampak administrasi pajak digital, peran uang elektronik dalam kepatuhan, dan efek krisis seperti pandemi COVID-19 terhadap perilaku wajib pajak. Memahami dinamika ini membutuhkan cakupan kuantitatif dan interpretasi yang bernuansa dari karya empiris di berbagai konteks.

Kepatuhan pajak di negara berkembang bukan hanya masalah akademis; hal ini memiliki implikasi nyata bagi tata kelola dan pembangunan manusia. Pemerintah di negara-negara ini seringkali bergantung pada pendapatan pajak untuk membiayai layanan penting seperti pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, dan program perlindungan sosial. Kepatuhan yang tidak memadai mengurangi ruang fiskal dan meningkatkan ketergantungan pada pinjaman eksternal, seringkali dengan persyaratan yang tidak menguntungkan, sehingga memperburuk beban utang dan membatasi prospek pembangunan jangka panjang. Lebih lanjut, kepatuhan yang tidak merata—di mana individu atau perusahaan yang lebih kaya mengeksploitasi celah hukum secara lebih efektif daripada wajib pajak rata-rata—dapat memperdalam ketidaksetaraan sosial dan mengikis kepercayaan terhadap lembaga publik. Isu-isu yang saling terkait ini menggarisbawahi perlunya landasan empiris yang terkonsolidasi untuk memandu solusi pragmatis yang responsif terhadap realitas lokal.

Meskipun jumlah studi empiris tentang kepatuhan pajak di negara berkembang semakin meningkat, literatur yang ada masih tersebar dengan kesenjangan yang signifikan dalam cakupan tematik, representasi geografis, dan integrasi teoretis. Tidak ada sintesis bibliometrik komprehensif yang memetakan perkembangan bidang ini, mengidentifikasi kontributor utama atau karya-karya berpengaruh, dan menyoroti tren yang berlaku serta area yang kurang dieksplorasi. Fragmentasi ini menghambat kemampuan para peneliti untuk membangun pengetahuan kumulatif dan membatasi akses para pembuat kebijakan terhadap bukti terpadu yang dapat dijadikan dasar strategi reformasi. Tujuan studi ini adalah untuk melakukan tinjauan bibliometrik komprehensif terhadap penelitian empiris tentang kepatuhan pajak di negara berkembang.

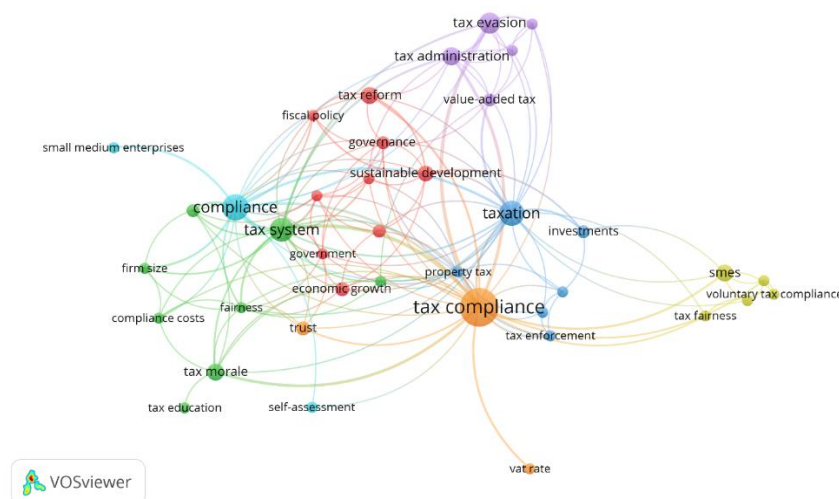
2. METODE

Studi ini mengadopsi desain tinjauan bibliometrik untuk menganalisis secara sistematis penelitian empiris tentang kepatuhan pajak di negara berkembang. Analisis bibliometrik adalah metode penelitian kuantitatif yang memeriksa pola dalam literatur akademis untuk menilai struktur, evolusi, dan lanskap intelektual suatu bidang penelitian [11]. Pendekatan ini sangat cocok untuk studi ini karena memungkinkan identifikasi tren publikasi, penulis berpengaruh, institusi, dan konsentrasi tematik dalam sejumlah besar literatur. Dengan berfokus secara eksklusif pada studi empiris, tinjauan ini memastikan bahwa analisis mencerminkan penelitian berbasis bukti yang berkontribusi langsung pada pemahaman perilaku wajib pajak dan hasil kepatuhan dalam konteks negara berkembang.

Kumpulan data untuk penelitian ini disusun melalui proses identifikasi dan penyaringan literatur yang terstruktur. Artikel jurnal yang ditinjau sejawat dipilih berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditentukan sebelumnya: (1) penelitian harus berfokus pada kepatuhan pajak atau konsep terkait seperti penghindaran pajak, moral pajak, atau kepatuhan sukarela; (2) latar empiris harus melibatkan satu atau lebih negara berkembang; (3) penelitian harus menggunakan metode empiris, termasuk pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau campuran; dan (4) publikasi harus ditulis dalam bahasa Inggris. Makalah konseptual, komentar kebijakan, bab buku, dan prosiding konferensi dikecualikan untuk menjaga konsistensi dan ketelitian analitis. Informasi bibliografi seperti kepengarangan, tahun publikasi, judul jurnal, fokus negara, kata kunci, dan jumlah kutipan diekstrak untuk membentuk basis data bibliometrik [12].

Analisis dilakukan menggunakan teknik bibliometrik deskriptif dan relasional. Analisis deskriptif digunakan untuk memeriksa hasil publikasi dari waktu ke waktu, distribusi jurnal, dan pola geografis produktivitas penelitian. Teknik relasional (termasuk analisis kepenulisan bersama, analisis kemunculan bersama kata kunci, dan analisis sitasi) digunakan untuk mengeksplorasi jaringan kolaborasi, tema penelitian dominan, dan pengaruh intelektual studi-studi kunci dalam bidang tersebut [13]. Pemetaan tematik diterapkan untuk mengidentifikasi topik inti, topik yang muncul, dan topik yang menurun dalam penelitian kepatuhan pajak di negara-negara berkembang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN



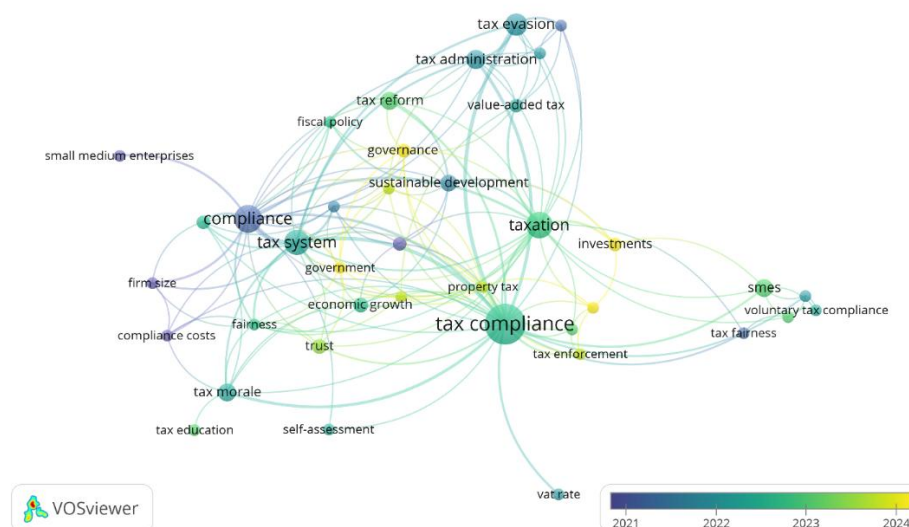
Gambar 1. Visualisasi jaringan
Sumber: Data Diolah

Gambar 1 menunjukkan bahwa tax compliance merupakan simpul paling sentral dan dominan, menandakan posisinya sebagai konsep inti dalam riset kepatuhan pajak di negara berkembang.

Keterhubungan yang kuat dengan kata kunci seperti *taxation*, *tax enforcement*, *governance*, dan *tax system* mencerminkan bahwa studi empiris tidak hanya menempatkan kepatuhan sebagai perilaku individual, tetapi juga sebagai hasil interaksi kompleks antara kebijakan fiskal, institusi, dan mekanisme administrasi pajak. Kepadatan koneksi ini menegaskan bahwa literatur telah berkembang ke arah pendekatan sistemik, bukan semata pendekatan kepatuhan berbasis hukuman. Klaster yang berfokus pada *compliance*, *tax system*, *fairness*, dan *tax morale* menunjukkan dominasi perspektif perilaku dan psikologis dalam penelitian kepatuhan pajak. Hubungan erat antara *trust*, *fairness*, dan *tax morale* menegaskan bahwa persepsi keadilan dan kepercayaan terhadap pemerintah memainkan peran kunci dalam mendorong kepatuhan sukarela, khususnya di negara berkembang yang sering menghadapi keterbatasan kapasitas institusional. Temuan ini mencerminkan pergeseran literatur dari model *deterrence* klasik menuju pendekatan berbasis norma sosial dan legitimasi institusional.

Klaster lain yang menonjol berkaitan dengan *taxation*, *tax administration*, *tax evasion*, dan *value-added tax*, yang merepresentasikan fokus kuat pada aspek struktural dan kebijakan pajak. Keterkaitan antara *tax reform*, *fiscal policy*, dan *governance* menunjukkan bahwa penelitian empiris semakin menyoroti reformasi pajak sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kepatuhan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks negara berkembang, pajak pertambahan nilai dan administrasi pajak modern menjadi tema penting karena kontribusinya terhadap penerimaan negara dan efisiensi sistem perpajakan. Keberadaan klaster yang berkaitan dengan SMEs, *small medium enterprises*, dan *voluntary tax compliance* menegaskan bahwa UMKM merupakan subjek empiris yang sangat dominan dalam studi kepatuhan pajak. Hal ini mencerminkan karakteristik ekonomi negara berkembang yang didominasi oleh sektor usaha kecil dan informal. Koneksi antara SMEs, *tax fairness*, dan *voluntary compliance* menunjukkan bahwa kepatuhan UMKM sangat dipengaruhi oleh kesederhanaan sistem, persepsi keadilan, serta biaya kepatuhan, bukan semata oleh tingkat penegakan hukum.

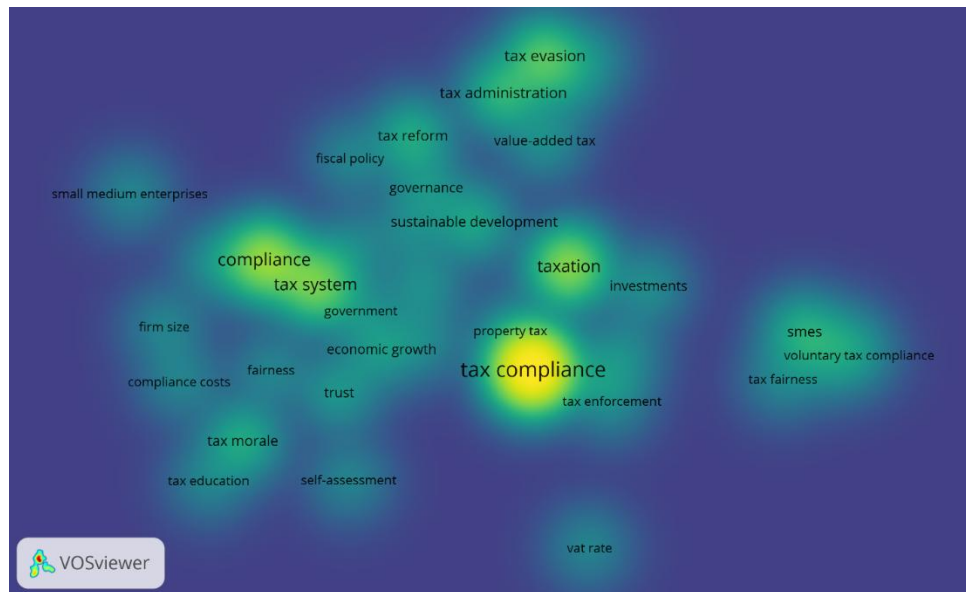
Struktur jaringan ini memperlihatkan integrasi antara dimensi perilaku, institusional, dan kebijakan dalam riset kepatuhan pajak di negara berkembang. Namun, kepadatan jaringan yang masih terpusat pada tema-tema klasik seperti *tax morale* dan *tax enforcement* mengindikasikan adanya ruang pengembangan untuk topik-topik baru, seperti digitalisasi administrasi pajak, teknologi kepatuhan berbasis data, dan integrasi sistem perpajakan dengan platform digital. Dengan demikian, peta bibliometrik ini tidak hanya menggambarkan lanskap riset yang ada, tetapi juga memberikan arah strategis bagi penelitian empiris masa depan.



Gambar 2. Visualisasi Overlay

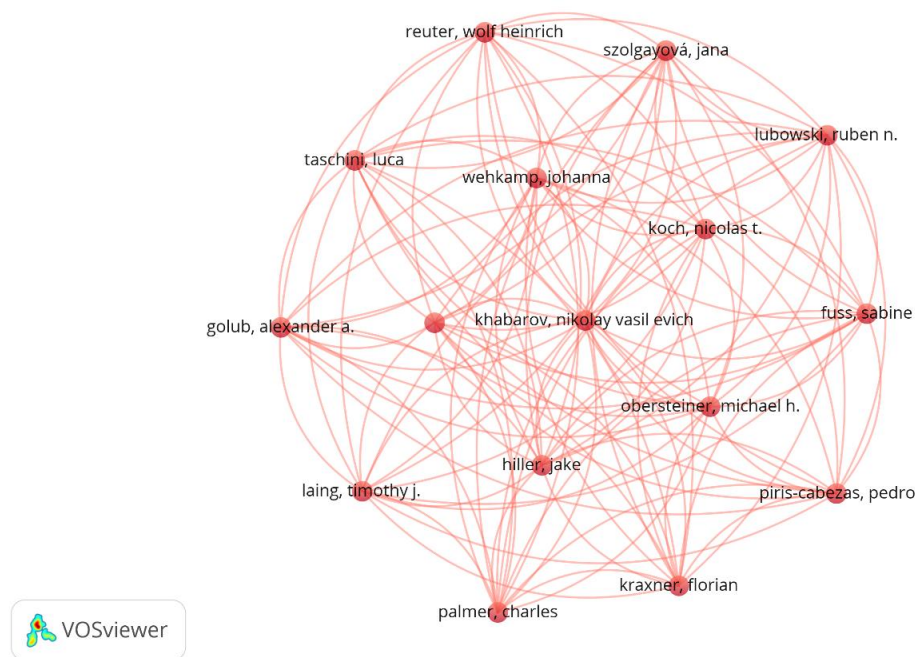
Sumber: Data Diolah

Gambar 2 menunjukkan dinamika temporal riset kepatuhan pajak di negara berkembang, di mana tax compliance tetap menjadi tema sentral yang konsisten sepanjang waktu. Warna yang lebih awal (biru-hijau) pada kata kunci seperti tax administration, tax evasion, dan value-added tax menandakan fokus awal penelitian pada isu struktural dan penegakan pajak sebagai mekanisme utama peningkatan kepatuhan. Tema-tema ini merefleksikan pendekatan klasik yang menekankan administrasi, reformasi pajak, dan pengendalian penghindaran pajak sebagai respons terhadap rendahnya kapasitas fiskal dan tingginya tingkat ketidakpatuhan di negara berkembang. Sebaliknya, kata kunci dengan warna lebih baru (kuning) seperti governance, sustainable development, tax fairness, SMEs, dan voluntary tax compliance mengindikasikan pergeseran riset ke arah pendekatan yang lebih normatif dan berorientasi pembangunan. Tren ini menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap peran tata kelola, keadilan pajak, serta kepatuhan sukarela (khususnya pada sektor UMKM) sebagai fondasi keberlanjutan sistem perpajakan. Perubahan temporal ini menegaskan bahwa literatur empiris terkini tidak lagi semata berfokus pada penegakan, tetapi semakin mengintegrasikan dimensi kepercayaan, legitimasi institusional, dan tujuan pembangunan jangka panjang dalam memahami kepatuhan pajak di negara berkembang.



Gambar 3. Visualisasi Densitas
Sumber: Data Diolah

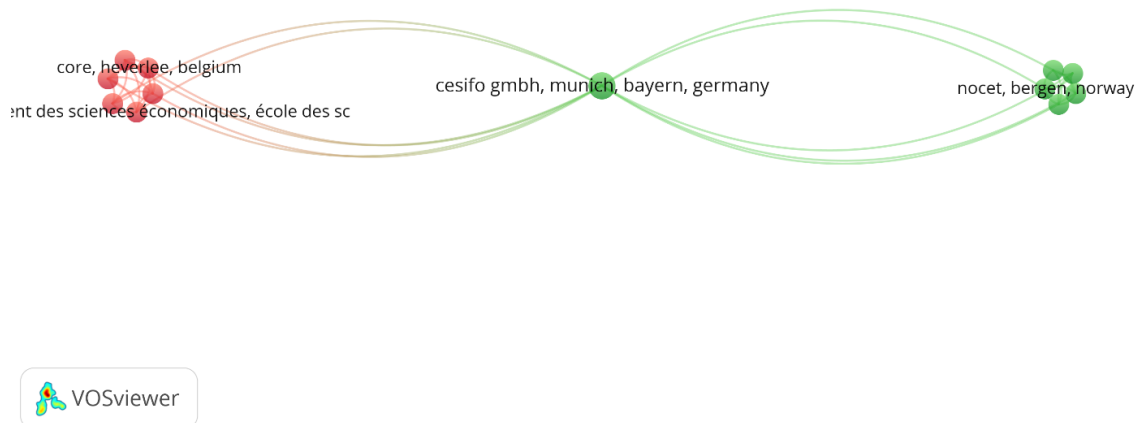
Gambar 3 menunjukkan bahwa tax compliance merupakan tema dengan intensitas penelitian tertinggi, ditandai oleh area paling terang dan paling padat di pusat peta. Kepadatan yang tinggi di sekitar tax enforcement, property tax, dan taxation mengindikasikan bahwa sebagian besar studi empiris di negara berkembang masih berfokus pada mekanisme kepatuhan formal dan instrumen kebijakan pajak. Pola ini mencerminkan perhatian besar literatur terhadap upaya peningkatan penerimaan negara melalui penguatan penegakan hukum, struktur tarif, serta desain sistem perpajakan yang efektif dalam konteks kapasitas institusional yang terbatas. Sementara itu, area dengan kepadatan menengah yang mencakup compliance, tax system, trust, tax morale, dan tax education menunjukkan berkembangnya pendekatan perilaku dan institusional dalam studi kepatuhan pajak. Keberadaan kluster UMKM dan voluntary tax compliance dengan intensitas yang relatif lebih rendah menandakan bahwa meskipun topik ini semakin relevan, risetnya masih belum sepadat tema-tema utama. Temuan ini mengindikasikan peluang riset lanjutan untuk memperdalam kajian kepatuhan sukarela, keadilan pajak, serta integrasi edukasi dan digitalisasi pajak, khususnya dalam mendukung transformasi sistem perpajakan yang berkelanjutan di negara berkembang.



Gambar 4. Visualisasi Penulis

Sumber: Data Diolah

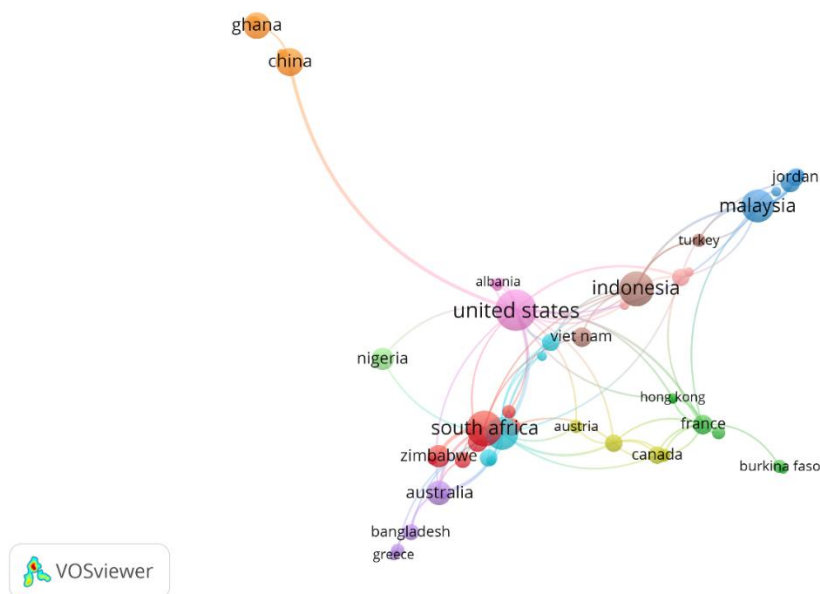
Gambar 4 illustrates a highly interconnected structure among leading scholars in the field of tax compliance research. Authors such as Khabarov, Nikolay Vasilievich, Wehkamp, Johanna, Reuter, Wolf Heinrich, and Szolgayová, Jana appear as central nodes, indicating their pivotal roles in shaping collaborative research agendas. The dense web of connections suggests strong cross-institutional and interdisciplinary collaboration, reflecting the complexity of tax compliance issues that require inputs from economics, public policy, and governance perspectives. The absence of isolated clusters implies that knowledge production in this field is driven by a closely knit scholarly community, where collaboration enhances methodological rigor and facilitates the diffusion of empirical insights, particularly relevant for addressing multifaceted tax compliance challenges in developing country contexts.



Gambar 5. Visualisasi Institusi

Sumber: Data Diolah

Gambar 5 menunjukkan bahwa riset empiris mengenai tax compliance didominasi oleh jejaring internasional yang relatif terpusat, dengan CESifo GmbH (Munich, Germany) berperan sebagai simpul penghubung utama antara klaster institusi di Belgia (seperti CORE–Université catholique de Louvain dan lembaga ekonomi terkait) dan Norwegia (NOCET–Bergen). Pola ini menegaskan peran lembaga riset ekonomi global sebagai knowledge hub yang memfasilitasi pertukaran ide, metodologi, dan data lintas negara. Dominasi institusi Eropa Barat juga mengindikasikan bahwa pengembangan kerangka empiris dan teoretis kepatuhan pajak di negara berkembang masih banyak dipengaruhi oleh perspektif dan kolaborasi dari pusat-pusat riset di negara maju, sehingga membuka peluang bagi institusi di negara berkembang untuk memperkuat keterlibatan dalam jejaring riset global.



Gambar 6. Visualisasi Negara
Sumber: Data Diolah

Gambar 6 menunjukkan bahwa United States berperan sebagai simpul utama dalam jejaring riset kepatuhan pajak, dengan konektivitas tinggi ke berbagai negara berkembang dan maju. South Africa dan Indonesia muncul sebagai pusat kolaborasi penting di Global South, menghubungkan penelitian dari Afrika, Asia Tenggara, dan mitra internasional seperti Australia, Malaysia, dan negara-negara Eropa. Pola ini menegaskan bahwa produksi pengetahuan empiris tentang tax compliance di negara berkembang sangat dipengaruhi oleh kerja sama lintas negara, di mana negara maju—khususnya Amerika Serikat—bertindak sebagai penggerak metodologis, sementara negara berkembang berkontribusi melalui konteks empiris dan studi kasus. Struktur jaringan ini sekaligus mengindikasikan peluang strategis bagi negara berkembang untuk memperluas kolaborasi Selatan–Selatan guna memperkaya perspektif kebijakan dan meningkatkan relevansi lokal dalam riset kepatuhan pajak.

Tabel 1. Literatur dengan Kutipan Terbanyak

Citations	Authors and year	Title
130	[14]	<i>Tax compliance and administration</i>
73	[15]	<i>The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance</i>

67	[16]	<i>Study on the optimal policy options for improving energy efficiency and Co-controlling carbon emission and local air pollutants in China</i>
58	[17]	<i>Industry 4.0 in Financial Services: Mobile Money Taxes, Revenue Mobilisation, Financial Inclusion, and the Realisation of Sustainable Development Goals (SDGs) in Africa</i>
58	[18]	<i>Governance quality and tax morale and compliance in Zimbabwe's informal sector</i>
49	[19]	<i>Casting a wider tax net: Experimental evidence from Costa Rica</i>
43	[20]	<i>The role of financial technology and entrepreneurial finance practices in funding small and medium-sized enterprises</i>
43	[21]	<i>Can land taxes foster sustainable development? An assessment of fiscal, distributional and implementation issues</i>
39	[22]	<i>Moderating role of patriotism on sales tax compliance among Jordanian SMEs</i>
36	[23]	<i>Size-dependent tax enforcement and compliance: Global evidence and aggregate implications</i>

Sumber: Scopus, 2026

Pembahasan

Hasil pemetaan bibliometrik menunjukkan bahwa penelitian empiris tentang kepatuhan pajak di negara berkembang berkembang secara signifikan dan terstruktur di sekitar tema inti tax compliance, yang terhubung erat dengan taxation, tax enforcement, dan tax administration. Dominasi tema-tema ini mencerminkan fokus tradisional literatur pada pendekatan struktural dan institusional, di mana kepatuhan dipandang sebagai respons terhadap kebijakan fiskal, mekanisme penegakan, dan desain sistem pajak. Temuan ini sejalan dengan konteks negara berkembang yang masih menghadapi tantangan kapasitas administrasi, basis pajak yang sempit, serta tingginya tingkat penghindaran dan penggelapan pajak, sehingga reformasi sistem dan penguatan penegakan menjadi agenda utama dalam penelitian empiris.

Namun demikian, visualisasi jaringan dan density juga mengungkap pergeseran penting menuju pendekatan perilaku dan normatif, yang ditandai oleh meningkatnya perhatian pada tax morale, trust, fairness, dan voluntary tax compliance. Keterkaitan yang kuat antara variabel-variabel tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak semata ditentukan oleh ancaman sanksi, tetapi sangat dipengaruhi oleh persepsi keadilan, legitimasi pemerintah, dan kualitas tata kelola. Temuan ini memperkuat argumen bahwa di negara berkembang—di mana penegakan hukum sering tidak optimal—pendekatan berbasis kepercayaan dan keadilan fiskal menjadi strategi yang lebih berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan, khususnya pada sektor UMKM yang mendominasi struktur ekonomi.

Dari perspektif kolaborasi ilmiah, hasil analisis co-authorship, institusi, dan negara menunjukkan bahwa produksi pengetahuan masih didominasi oleh jejaring riset yang berpusat di negara maju, terutama Amerika Serikat dan institusi Eropa, dengan negara berkembang berperan sebagai lokasi empiris utama. Meskipun kolaborasi ini memperkaya metodologi dan kerangka analisis, pola tersebut juga mengindikasikan adanya kesenjangan epistemik dan perlunya penguatan kontribusi akademisi dari negara berkembang. Ke depan, penelitian kepatuhan pajak perlu diarahkan pada pengembangan model kontekstual yang mengintegrasikan digitalisasi perpajakan, ekonomi informal, dan tujuan pembangunan berkelanjutan, sekaligus mendorong kolaborasi Selatan-Selatan agar kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan aplikatif bagi konteks lokal negara berkembang.

4. KESIMPULAN

Studi bibliometrik ini menyimpulkan bahwa riset empiris mengenai tax compliance di negara berkembang telah berkembang secara signifikan dan membentuk lanskap pengetahuan yang terstruktur

di sekitar tiga dimensi utama, yaitu kebijakan dan penegakan pajak, faktor perilaku wajib pajak, serta tata kelola dan pembangunan berkelanjutan. Temuan menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan kepatuhan berbasis deterrence menuju model yang lebih integratif, yang menekankan peran keadilan pajak, kepercayaan, dan kepatuhan sukarela—khususnya pada sektor UMKM. Meskipun kolaborasi ilmiah lintas negara memperkaya kualitas metodologis penelitian, dominasi institusi dan negara maju masih terlihat, sehingga membuka peluang bagi peningkatan kontribusi akademik dari negara berkembang. Secara keseluruhan, studi ini menegaskan pentingnya pengembangan riset kepatuhan pajak yang kontekstual, berorientasi kebijakan, dan adaptif terhadap transformasi digital guna mendukung sistem perpajakan yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan di negara berkembang.

REFERENSI

- [1] P. B. Saptono and I. Khozen, "What determines the tax compliance intention of individual taxpayers receiving COVID-19-related benefits? Insights from Indonesia," *Int. J. Sociol. Soc. Policy*, vol. 43, no. 11/12, pp. 1190–1217, 2023.
- [2] S. Haerani, R. A. Damayanti, and S. Fattah, "Exploring of Tax Compliance: Tax Practitioners Interpretation," *J. Multidisiplin Madani*, vol. 3, no. 2, pp. 392–403, 2023.
- [3] N. Perveen and A. Ahmad, "Tax Technology, Fairness Perception and Tax Compliance among Individual Taxpayers," *Audit Account. Rev.*, vol. 2, no. 2, pp. 99–120, 2022.
- [4] Z. Riaz, M. A. Shafiq, S. H. A. Gillani, N. Yasin, and H. Kanwal, "The impact of perception of justice on tax compliance behavior through the mediating role of social support: an empirical study in Pakistan," *J. Soc. Sci. Rev.*, vol. 3, no. 1, pp. 918–931, 2023.
- [5] B. S. Prianto *et al.*, "Flourishing MSMEs: The Role of Innovation, Creative Compliance, and Tax Incentives," *J. risk Financ. Manag.*, vol. 17, no. 12, p. 532, 2024.
- [6] J. A. Granfon, W. N. J. D. Lagare, D. A. Aling, N. B. D. Dangcalan, and A. A. Ebanay, "Factors Affecting Tax Compliance of MSMEs in Dipolog City," *Int. J. Multidiscip. Appl. Bus. Educ. Res.*, vol. 4, no. 4, pp. 1350–1364, 2023.
- [7] N. Walter and M. Wilson, "Influence of computer literacy levels on tax compliance among Harare central business district small and medium enterprises," 2023.
- [8] A. Kurniawan, R. N. B. Meliala, and F. R. Febrianto, "Factors Influencing Tax Compliance In Indonesia," *Ris. J. Apl. Ekon. Akunt. dan Bisnis*, vol. 5, no. 1, pp. 1–13, 2023.
- [9] Y. K. Susanto and I. Fiorita, "Taxpayer Compliance: Taxpayer Behavior Analysis and Tax Awareness as A Mediating in Indonesia," *J. Bisnis dan Akunt.*, vol. 25, no. 1, pp. 197–206, 2023.
- [10] R. N. Sari, N. Herawati, and N. F. M. Pauzi, "The Mapping of Tax Compliance Research in Indonesia," *Wahana Ris. Akunt.*, vol. 11, no. 1, pp. 63–76, 2023.
- [11] N. Donthu, S. Kumar, D. Mukherjee, N. Pandey, and W. M. Lim, "How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines," *J. Bus. Res.*, vol. 133, pp. 285–296, 2021.
- [12] I. Zupic and T. Čater, "Bibliometric methods in management and organization," *Organ. Res. methods*, vol. 18, no. 3, pp. 429–472, 2015.
- [13] M. Aria and C. Cuccurullo, "A brief introduction to bibliometrix," *J. Informetr.*, vol. 11, no. 4, pp. 959–975, 2017.
- [14] J. Alm, "Tax compliance and administration," in *Handbook on taxation*, Routledge, 2019, pp. 741–768.
- [15] S. Night and J. Bananuka, "The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance," *J. Econ. Financ. Adm. Sci.*, vol. 25, no. 49, pp. 73–88, 2020.
- [16] P. Song, X. Mao, Z. Li, and Z. Tan, "Study on the optimal policy options for improving energy efficiency and Co-controlling carbon emission and local air pollutants in China," *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 175, p. 113167, 2023.
- [17] F. Y. Mpofu, "Industry 4.0 in financial services: Mobile money taxes, revenue mobilisation, financial inclusion, and the realisation of sustainable development goals (SDGs) in Africa," *Sustainability*, vol. 14, no. 14, p. 8667, 2022.
- [18] F. Y. Sebele-Mpofu, "Governance quality and tax morale and compliance in Zimbabwe's informal sector," *Cogent Bus. Manag.*, vol. 7, no. 1, p. 1794662, 2020.

- [19] A. Brockmeyer, S. Smith, M. Hernandez, and S. Kettle, "Casting a wider tax net: Experimental evidence from Costa Rica," *Am. Econ. J. Econ. Policy*, vol. 11, no. 3, pp. 55–87, 2019.
- [20] P. Łasak, "The role of financial technology and entrepreneurial finance practices in funding small and medium-sized enterprises," *J. Entrep. Manag. Innov.*, vol. 18, no. 1, pp. 7–34, 2022.
- [21] M. Kalkuhl, B. F. Milan, G. Schwerhoff, M. Jakob, M. Hahnen, and F. Creutzig, "Can land taxes foster sustainable development? An assessment of fiscal, distributional and implementation issues," *Land use policy*, vol. 78, pp. 338–352, 2018.
- [22] A. F. Alshira'h and H. Abdul-Jabbar, "Moderating role of patriotism on sales tax compliance among Jordanian SMEs," *Int. J. Islam. Middle East. Financ. Manag.*, vol. 13, no. 3, pp. 389–415, 2020.
- [23] P. Bachas, R. N. F. Jaef, and A. Jensen, "Size-dependent tax enforcement and compliance: Global evidence and aggregate implications," *J. Dev. Econ.*, vol. 140, pp. 203–222, 2019.